

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka mengkaji mengenai teori kepustakaan yang menjelaskan penelitian agar mendukung beberapa rumusan masalah sebagai landasan yang dipakai selanjutnya dengan analisis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Materi yang disajikan dalam rumusan masalah ini yaitu tentang Administrasi Publik, Teori organisasi, Konsep Pembangunan, Koordinasi, Manajemen dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai landasan teori untuk menyimpulkan kerangka berpikir dan proposisi

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya peneliti dalam rangka mencari bandingan dalam suatu penelitian. Kajian penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas sebuah penelitian. Kajian penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti untuk menemukan inspirasi baru, walaupun lokasi dan masalahnya tidak sama persis tetapi itu sangat membantu peneliti agar bisa menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam penelitian.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

| | | | |
|--|--|--|---|
| Nama <i>(Name)</i> | Imas Sumiati, Rifki Khairul Arifin | Diana Mahmuda, Wawan Budi Darmawan | Rizki Khairunnisa, Roni Ekha Putera, Yoserizal |
| Jenis Luaran Laporan Penelitian | ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin | Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) | Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi |
| Tahun | 2024 | 2022 | 2021 |
| Universitas <i>(University)</i> | Universitas Pasundan | Universitas Padjadjaran | Universitas Andalas |
| Judul <i>(Title)</i> | Koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Cimahi | Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang | Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap |
| Latar Belakang Historis <i>(Historical</i> <i>Background)</i> | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang tahun 2019 telah terjadi 3.814 kejadian dengan 784 di antaranya merupakan bencana banjir (BNPB, 2020a). Sebagaimana diatur dalam peraturan | Pemerintahan desa merupakan salah satu penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat yang ada di desa sebagai salah satu | Bencana kabut asap yang sering terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan seolah menjadi isu tahunan yang selalu melanda Indonesia terutama di pulau Sumatera dan di pulau Kalimantan. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Berkaitan dengan ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Cimahi nomor 29 tahun 2015 tentang tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah salah satu Perangkat Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana dalam mendukung program-program pemerintahan dan pembangunan di Kota Cimahi. Sebagai unsur. Berkaitan dengan itu, penanggulangan bencana hendaknya dipahami tidak hanya sebatas evakuasi dan analisis pasca bencana, akan tetapi lebih dari itu yakni pada aspek</p> | <p>model dari sistem pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyelenggarakan urusan pemerintah-nya oleh Pemerintah Desa itu sendiri. Peraturan Desa (Perdes) menjadi suatu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Kepala Desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam</p> | <p>Kabupaten Kampar merupakan daerah tertinggi yang terkena penyakit ISPA dari enam daerah rawan bencana kabut asap lainnya. Penanggulangan bencana kabut asap tidak bisa hanya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar saja. Namun tetap harus ada koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait agar penanggulangan kabut asap lebih dapat diatasi secara cepat dan tepat. Tapi pada kenyataannya, koordinasi yang dilakukan sering kali belum berjalan</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p> pencegahan terhadap bencana. Oleh karena itu memang koordinasi antar institusi dalam pencegahan dan koordinasi antar institusi pasca musibah menjadi sangat penting. , belum selesainya persoalan penanggulangan bencana banjir diduga karena belum berjalannya koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial dalam menanggulangi bencana banjir. Akibatnya adalah korban banjir terlantar, meskipun bantuan dari berbagai pihak berdatangan namun langkah konkrit dari kedua institusi menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Ada tiga faktor yang menyebabkan bencana banjir (Yulaelawati & Shihab, 2008: 8– 11) </p> | <p> Negeri No. 84 Tahun 2015 berkedudukan sebagai pemimpin dengan memiliki kekuasaan secara tunggal yang kemudian dibantu oleh perangkat desa dan bertugas dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan sejalan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sedangkan BPD sebagai unsur legislatif secara nyata memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pemerintahan Desa dan didirikan sebagai perwujudan demokrasi masyarakat di </p> | <p> dengan maksimal. Hal tersebut terbukti dengan selalu terjadinya bencana kabut asap khususnya di Kabupaten Kampar pada setiap tahunnya </p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>yaitu: Pertama, faktor aktivitas manusia, seperti pemanfaatan dataran banjir untuk pemukiman dan industri, penggundulan hutan dan kemudian mengurangi resapan pada tanah dan meningkatkan larian tanah permukaan. Kedua, faktor alam yang bersifat tetap (statis) seperti kondisi geografi yang berada pada daerah yang sering terkena badai atau siklon, kondisi topografi yang cekung yang merupakan dataran banjir, kondisi alur sungai yang kemiringan dasar sungainya datar. Ketiga, faktor alam yang bersifat dinamis seperti curah hujan yang tinggi, terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai atau pertemuan sungai besar, penurunan muka tanah atau</p> | <p>tingkat desa (Nugraha, Suryawan, & Arthanaya, 2021). Melalui pra-riset yang ditemukan oleh penulis telah ditemukan bahwa pelaksanaan penyusunan Perdes sejauh ini di Desa Cileles masih belum mencapai substansi penyusunan yang baik. Hal tersebut diduga disebabkan oleh kondisi koordinasi yang dirasa kurang baik antara BPD dengan Kepala Desa beserta jajarannya. Sehingga penulis rasa di Desa Cileles diperlukan adanya tuntutan untuk</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| | amblesan, pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi. Aktivitas manusia berperan besar bagi terjadinya bencana banjir. | memperbaiki koordinasi antara BPD dan Kepala Desa. | |
| Konteks Kekinian terkait dengan topik <i>(Current Context)</i> | Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Cimahi dalam penanggulangan bencana banjir di Cimahi | Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam pembentukan perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang | Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar sebagai leading sector dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan bencana kabut asap |
| Teori-teori yang telah dan sedang dipergunakan peneliti lain <i>(Theories Underpinning)</i> | Dalam hal ini penanggulangan bencana banjir menjadi salah satu yang diterapkan adalah adanya koordinasi yang baik dengan instansi yang | Pelaksanaan koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan | Koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>terlibat dalam Penanggulangan Bencana Banjir tersebut, dimana koordinasi pada objek kegiatan tertentu agar berjalan dengan baik sesuai tujuan yang sudah direncanakan.</p> <p>Menurut Sutarto (1992 : 31) adapun manfaat koordinasi yang baik dalam suatu organisasi itu antara lain: 1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan suatu pendapat bahwa suatu organisasinya atau jabatan merupakan yang paling penting. 2. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antara satuan organisasi atau antar pejabat. 3.</p> | <p>Jatinangor dengan menggunakan tiga indikator koordinasi menurut Hasibuan (dalam penelitian Rinto et al., 2021) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerja Sama b. Kesatuan Tindakan c. Komunikasi | <p>yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu, sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2011). aktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2006:88) (Hasibuan) dalam Jurnal Manoppo dkk (2017), yaitu: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin</p> |
|--|---|---|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya peristiwa atau waktu menunggu yang memakan waktu lama. 4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi. 5. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi. 6. Dengan koordinasi dapat menimbulkan kesadaran antar pejabat yang ada dalam satuan</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>organisasi yang sama. 7. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran antara pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama. 8. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat. 9. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya langkah antar pejabat. 10. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat. 11. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan kebijaksanaan antar pejabat. Dalam pelaksanaan koordinasi suatu organisasi harus memiliki pedoman seperti: 1.</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian yang bergerak sendiri-sendiri. 2. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi. 3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya. 4. Wujud koordinasi harus menunjukkan pendekatan multi institusional, dengan wujud saling</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>memberi informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Dengan adanya pedoman dalam melaksanakan koordinasi diharapkan koordinasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Adanya kerjasama itu harus memperhatikan prinsip-prinsip yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Hubungan kerjasama saling pengertianb. Tindakan tindakan yang selarasc. Kesatuan tindakan <p>Dalam kerjasama dibutuhkan adanya</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | saling pengertian dari personil yang bertugas maupun antar instansi yang terkait | | |
| Mendudukan terminologi-terminologi yang relevan yang dipergunakan dalam berbagai penelitian sejenis (Terminology) Metode Penelitian | Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang bentuk berupa deskriptif gambaran narasi dari permasalahan yang diteliti sesuai fakta lapangan dengan metode literature review. Teknik analisis data penelitian adalah sebagai berikut : 1.Reduksi data 2.Penyajian data 3.Kesimpulan | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh dalam metode ini berasal dari beberapa informan, dokumen, jurnal yang kemudian data hasil penemuan akan di analisis secara induktif, mereduksi, memverifikasi, serta menafsirkan berbagai makna yang muncul dalam permasalahan yang sedang diteliti.). | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan datanya engan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini seperti adanya peraturan, laporan, dan dokumen lainnya. |
| Penjelasan bukti-bukti | Berdasarkan data dari hasil penelitian | Berdasarkan data dari hasil | Penelitian ini menghasilkan |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>terkait pentingnya topik riset ini (Significant) Hasil Penelitian</p> | <p>yang dilakukan maka diketahui bahwa Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana banjir belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh tidak adanya program kerja bersama dan intensitas komunikasi yang rendah. Dengan melakukan pertemuan atau rapat, setiap pihak dapat mengemukakan beberapa kendala dan bersama-sama akan dibahas jalan keluar atau solusi untuk memecahkan hal tersebut,</p> | <p>penelitian yang dilakukan maka diketahui bahwa bentuk koordinasi kerja sama dalam pembentukan Perdes bersifat horizontal inter-related. Kehadiran BPD dalam suatu pemerintahan di tingkat desa memiliki fungsi sebagai pihak yang harus menciptakan mekanisme check and balances sebagai perwujudan pemerintahan yang berdemokrasi. Tetapi peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa dalam proses perumusan kebijakan ditinjau dari bentuk koordinasi kerja</p> | <p>kesimpulan bahwa Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap disini dapat dikatakan sudah Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap disini dapat dikatakan sudah beberapa kegiatan yang dijalankan oleh instansi terkait masih ada yang belum berjalan secara maksimal karena adanya beberapa kendala yang terjadi.</p> |
|---|--|---|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>biasanya semakin banyak pertemuan yang dilakukan maka akan semakin memperlancar kegiatan yang diprogramkan.</p> | <p>sama diantara BPD dan Kepala Desa di Desa Cileles belum berjalan dengan baik. Selanjutnya bentuk kesatuan tindakan yang terlihat dalam koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa Cileles dalam proses pembentukan Perdes dianggap fleksibel dan telah berjalan dengan baik mengikuti sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. bentuk komunikasi yang terjalin dalam hubungannya dengan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa Cileles dalam proses</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>pembentukan Perdes sejauh ini menunjukkan bahwa bentuk komunikasi yang terjalin antara BPD dengan Kepala Desa tidak mengalami benturan yang cukup serius. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan hubungan kerja yang tidak maksimal antara BPD dengan Kepala Desa. dari sisi political will Kepala Desa dan BPD atau komitmen politik yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Cileles dalam menghadapi fenomena masalah tersebut sebagai</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | konsekuensi logis yang harus dihadapi dirasa masih kurang. | |
| Penjelasan keunggulan penelitian yang kita lakukan (<i>Research gap</i>) | Berfokus pada koordinasi yang bersifat horizontal yang melibatkan BPBD dan juga Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Cimahi. Dalam koordinasi yang dilakukan, kedua instansi tersebut masing masing menjadi leading sector dalam tupoksinya masing-masing. BPBD sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana, selain itu sebagai koordinator dan juga sebagai pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah. | Berfokus pada koordinasi yang bersifat horizontal yang dimana tingkatan hierarki BPD dan Kepala Desa beserta jajarannya mempunyai kedudukan yang sama dalam proses pembuatan perdes | Berfokus pada koordinasi antar Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar untuk penanggulangan bencana kabut asap yang dilakukan oleh BPBD yang dimana ditunjuk sebagai leading sector, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Kesehatan. Masing-masing instansi tersebut mempunyai tupoksi masing masing dalam pelaksanaan sesuai dengan tugasnya masing-masing |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>pasca bencana, seperti pemberian logistik untuk pangan serta mendirikan posko tanggap bencana mulai dari dapur umum, pos kesehatan dan lain sebagainya.</p> | | |
| | <p>Keunggulan dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu akan secara komprehensif menjawab bagaimana proses koordinasi yang bersifat koordinasi horizontal dan koordinasi vertikal. Yang dimana dalam koordinasi horizontal ini pemerintahan desa dan juga BPD dalam hal ini sebagai mitra desa dan mempunyai kedudukan yang sama saling berkordinasi satu</p> | <p>Keunggulan dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu akan secara komprehensif menjawab bagaimana proses koordinasi yang bersifat koordinasi horizontal dan koordinasi vertikal. Yang dimana dalam koordinasi horizontal ini pemerintahan desa dan juga BPD dalam hal ini sebagai mitra desa dan mempunyai</p> | <p>Keunggulan dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu akan secara komprehensif menjawab bagaimana proses koordinasi yang bersifat koordinasi horizontal dan koordinasi vertikal. Yang dimana dalam koordinasi horizontal ini pemerintahan desa dan juga BPD dalam hal ini sebagai mitra desa dan mempunyai sama saling</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>sama lain. Dalam koordinasi vertikal Kepala desa sebagai pemimpin di desa selalu berkordinasi dengan bawahannya dalam hal ini aparatur desa, kadus dan juga tokoh masyarakat sehingga proses koordinasi yang dilaksanakan menciptakan sebuah tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan infrastuktur yang bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan.</p> | <p>kedudukan yang sama saling berkordinasi satu sama lain. Dalam koordinasi vertikal Kepala desa sebagai pemimpin di desa selalu berkordinasi dengan bawahannya dalam hal ini aparatur desa, kadus dan juga tokoh masyarakat sehingga proses koordinasi yang dilaksanakan menciptakan sebuah tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan infrastuktur yang bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan.</p> | <p>berkordinasi satu sama lain. Dalam koordinasi vertikal Kepala desa sebagai pemimpin di desa selalu berkordinasi dengan bawahannya dalam hal ini aparatur desa, kadus dan juga tokoh masyarakat sehingga proses koordinasi yang dilaksanakan menciptakan sebuah tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan infrastuktur yang bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan.</p> |
|--|---|--|---|

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek yang dikaji oleh peneliti, maka judul penelitian yang diajukan oleh peneliti yaitu “Koordinasi Pemerintahan Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Cikancung Kabupaten Bandung” layak untuk dikaji dan diteliti. Setelah memahami hasil penelusuran terdahulu maka, dapat diketahui tingkat keaslian dan keabsahan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Sehingga dengan demikian penelitian terdahulu menambah khazanah keilmuan yang dapat mendukung peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan orisinal. Serta adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan panduan di dalam melakukan penelitian.

2.1.2 Kajian Terhadap *Grand Theory*

2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Ketika Administrasi ada, selalu ada pola pikir yang dijadikan pedoman untuk melakukan berbagai aktivitas manusia yang sengaja dilakukan agar pelaksanaan berbagai tindakan yang telah direncanakan sebelumnya tidak gagal. Sebagai bisnis atau kegiatan, administrasi berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan. Ada banyak tugas administrasi yang berada di bawah payung administrasi. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari membuat catatan hingga melakukan pembukuan sederhana hingga menyiapkan agenda. Administrasi digambarkan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara efisien dan efektif. Sebagai ilmuwan administrasi dan sebagai

praktisi administrasi, kami selalu terlibat dalam proses konstruksi teori administrasi secara berkesinambungan.

Misalnya, **Silallahi** mengkaji administrasi dalam arti luas dalam bukunya **Studies on Administrative Sciences (2016:7)**: “Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.”

Menurut definisi para ahli, administrasi adalah bentuk kerja sama manusia di mana rencana dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Administrasi dalam kenyataannya bertingkat-tingkat, dimulai dari gambaran yang paling luas dan berlanjut ke gambaran yang paling sempit, apakah kita melihat fokus kajiannya dengan menuntut pemikiran ilmiah ataukah kita melihatnya dari segi fokus kajiannya dengan mensyaratkan pemikiran ilmiah dan pemikiran ilmiah. juga dalam pengertian lokus sebagai suatu kegiatan atau kegiatan yang hasilnya dapat memenuhi tuntutan hidup manusia.

Administrasi didefinisikan sebagai berikut oleh **Silallahi** dalam bukunya **The Study of Administrative Sciences (2016:5)**:

“Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain”

Dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah pengumpulan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis untuk memudahkan dalam memperoleh data pada saat dibutuhkan di kemudian hari.

Untuk itu peneliti mengacu pada konsep administrasi **Siagian (2003:2)** yang tertuang dalam buku *Administrasi Pembangunan*, yang menjelaskan “administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut **Felix A. Nigro dan Lloyd G. (1970:21)** Nigro yang dikutip dalam buku **Pasolong, n.d, (2019)** yang berjudul “Teori Administrasi Publik”, mengemukakan bahwa sebagai berikut:

1. *.(Public Administration) is Cooperative group effort in public setting.* (Administrasi Publik) adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. *(Public Administration) covers all three branches: executive, legislative and judicial, and their interrelationships.* (Administrasi Publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislative dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.
3. *(Public Administration) has an important role formulating of public policy and is thus a part of the political process.* (Administrasi Publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4. *(Public Administration) is cosely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community.* (Administrasi Publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. *(Public Administration) is different in significant ways from private administration.* (Administrasi Publik) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Dari uraian di atas peneliti berpendapat bahwa administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif melalui penyelenggaraan pelayanan publik dan tercapainya tujuan negara.

Menurut **Rosenbloom (2005)** yang dikutip dalam buku **Pasolong, n.d, (2019)** yang berjudul “Teori Administrasi Publik”, mengemukakan bahwa sebagai berikut:

“Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau bagian”

Berdasarkan uraian di atas bahwa administrasi publik berkaitan dengan dunia eksekutif, yudikatif dan legislatif. Peneliti berpendapat bahwa administrasi publik yang berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik serta berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah.

Pada dasarnya administrasi mempunyai peranan yang sangat krusial dan penting dalam menyelenggarakan pencapaian tujuan dalam proses administrasi negara maupun administrasi publik mengenai tugas-tugas pemerintah maupun merumuskan suatu kebijakan dalam sebuah negara. Administrasi negara, administrasi publik maupun manajemen merupakan sistem yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

Hal ini untuk mencapai suatu proses tujuan administrasi yang telah ditentukan dengan melibatkan dua orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu sasaran, maka dalam lingkup administrasi tidak terlepas dalam sebuah wadah organisasi untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Publik

Kehadiran administrasi dalam suatu negara merupakan suatu keharusan dan kebutuhan; administrasi adalah kumpulan norma dan keteraturan yang dapat digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum. Administrasi adalah kumpulan peraturan dan keteraturan yang dapat digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum. Namun, itu diubah menjadi layanan yang disponsori negara. Sekalipun Negara benar-benar diselenggarakan untuk kepentingan rakyat, masyarakat dapat dianggap sebagai Negara di satu pihak, dengan kepentingan masyarakat umum dilayani oleh pemerintah di pihak lain, sepanjang hal ini dilakukan sesuai dengan standar moral agama.

Administrasi publik merupakan bagian dari adanya perubahan di dalam khazanah keilmuan proses penyelenggaraan negara. Di mana sebelumnya administrasi publik adalah administrasi negara, yang hanya berfokus pada proses pencapaian tujuan-tujuan negara sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam berbagai kebijakan, melalui instansi pemerintahan pusat dan instansi pemerintahan daerah sebagai motor penggeraknya.

Dengan demikian meskipun antara administrasi negara dan administrasi publik sama-sama berfokus pada pencapaian tujuan negara, namun terdapat perbedaan yang menjadi landasan dasar dalam basis penyelenggaraannya, yaitu di mana administrasi publik berorientasikan pada *public service*, sehingga kepentingan publik menjadi unsur yang paling diutamakan terutama di era transparansi pemerintahan saat ini. Administrasi publik memiliki ruang lingkup yang cukup luas di dalam ranah keilmuan, yaitu untuk mengatur mekanisme dan

peranan negara dalam berkontribusi pada semua lini tata kelola pemerintahan. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad yang dikutip oleh **Sellang (2016:48)** dalam bukunya yang berjudul “**Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya**” ruang lingkup administrasi publik yaitu meliputi sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik
2. Birokrasi Pulik
3. Manajemen Publik
4. Kepemimpinan
5. Pelayanan Publik
6. Kinerja
7. Etika Administrasi

Sebagaimana menurut **Hughes** yang dikutip oleh **Revida dkk, (2020 : 3)** dalam bukunya yang berjudul “**Teori Administrasi Publik**” “administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayanan pulik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa administrasi publik adalah proses melayani publik, yang sesuai dengan implementasi kebijakan. Sehingga dalam realitanya proses pelayanan publik harus disesuaikan dengan regulasi dan SOP yang berlaku.

Dengan demikian menurut **Pasolog**, yang dikutip oleh **Revida dkk, (2020:3)** dalam bukunya yang berjudul “**Teori Administrasi Publik**” “administrasi publik adalah bentuk Kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau Lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.”

Definisi tersebut mengandung makna implisit bahwa administrasi publik atau organisasi publik setiap anggotanya harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bobot tanggung jawab kinerja jabatan yang dimiliki. Administrasi publik merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan publik.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang disampaikan **Chandler dan Plano** yang dikutip oleh **Sellang (2016:42)** dalam bukunya yang berjudul “**Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya**” “proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan dalam kebijakan publik.”

Administrasi publik melibatkan partisipasi sumber daya anggota organisasi. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan bersamaan. Kebijakan yang diformulasikan melalui asas transparansi *stakeholder* terkait.

Seperti halnya yang disampaikan **Dimock dan Koenig**, yang dikutip oleh **Mindarti (2016 : 4)** dalam bukunya yang berjudul “**Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik**” “administrasi publik dapat di definisikan sebagai kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah.”

Pemahaman di atas memperlihatkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan inti dari pemerintah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Namun dalam realitasnya administrasi publik melibatkan seluruh anggota kelompok yang memiliki tanggung jawab beban kerja pada setiap jabatan di dalam instansi pemerintahan.

Pemahaman tersebut selaras berdasarkan definisi yang diberikan oleh **Michael M. Harmon & Richard** yang dikutip oleh **Sellang (2016:42)** dalam bukunya yang berjudul “**Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya**” “administrasi tidak mengacu pada secara eksklusif kepada orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan pemerintah.”

Administrasi publik secara garis besar adalah seluruh rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan persoalan publik, sehingga memiliki substansi pada pemberian pelayanan kepada publik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dalam hal ini didominasi oleh instansi pemerintahan.

Administrasi publik menjadi unsur fundamental di dalam penyelenggaraan sistem birokrasi pemerintah. Dengan demikian administrasi harus mampu menjadi wadah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Hal ini didukung dengan pernyataan Gordon yang dikutip Oleh **Henry** terjemahan **Lontoh (1993:21)** dalam bukunya “**Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan**”

Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor publik. Selain itu dituntut adanya keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang efisien, atau dengan perkataan lain pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas mengarahkan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem birokrasi yang prima dalam mengelola sumber daya, baik itu infrastruktur maupun sumber daya aparatur.

Sumber daya aparatur pemerintahan harus ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimilikinya masing-masing.

Menurut **Gordon** yang dikutip Oleh **Henry** terjemahan **Lontoh (1993 : 6)** dalam bukunya “**Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan**” “ciri dari administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.”

Pendapat tersebut secara eksplisit telah menyatakan bahwa di dalam proses administrasi publik, pola penyelenggaraan tata kelola birokrasi harus sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Sehingga setiap individu memiliki elektabilitas kinerja berdasarkan kewajiban beban kerja yang harus dipenuhi. Untuk mewujudkan birokrasi ideal sesuai dengan otoritas legal rasional, maka harus disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan administrasi publik yang sesuai dan relevan. Seperti yang dikemukakan oleh Max Weber yang dikutip oleh **Sellang (2016:50)** dalam bukunya yang berjudul “**Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya**” mengemukakan prinsip-prinsip fundamental dari otoritas legal-formal sistem birokrasi administrasi publik sebagai berikut :

1. Pengorganisasian fungsi jabatan yang berkelanjutan dan ditetapkan dengan peraturan
2. Bidang kompetensi khusus yang meliputi kewajiban, otoritas dan sarana paksaan
3. Susunan jabatan yang mengikuti prinsip hierarki
4. Peraturan dan norma teknis untuk pelaksanaan jabatan
5. Pemisahan hak pribadi dan milik organisasi
6. Tidak ada pemberian yang terkait dengan posisi jabatan
7. Tindakan, keputusan dan peraturan tertulis

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa sistem manajerial kinerja instansi pemerintahan menjadi esensi krusial di dalam proses administrasi publik. Selain itu administrasi publik juga melingkupi mekanisme kerja manajemen kepegawaian instansi pemerintahan serta manajemen kerja individu aparatur pada instansi pemerintah. sistem manajemen administrasi publik terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan anomali publik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang prima sesuai dengan dinamika penyelenggaraan negara dan sistem layanan publik yang dibutuhkan. Layanan publik bukan hanya melingkupi kebutuhan masyarakat saja, tetapi juga para *stakeholder* pemberi layanan.

2.1.2.3 Pengertian Organisasi

Manusia pada hakikatnya tidak akan mampu hidup sendiri dan hampir sebagian besar tujuannya hanya dapat terpenuhi, apabila yang bersangkutan ada hubungannya dengan orang lain. Maka tidak heran, kalau orang lebih banyak berinteraksi dan berkomunikasi dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya, ketimbang hidup sendiri. Jadi, untuk menghilangkan kekurangan seseorang individu dalam mencapai tujuannya, maka ia perlu melibatkan diri dengan beberapa kelompok atau organisasi. Karena itu organisasi terbentuk, memang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan.

Organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *organize* yang berarti membangun atau membentuk suatu kesatuan dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain. Dilihat dari segi ini, organisasi bisa berarti organisme, yang melakukan organizing, dan bisa juga berarti keluaran (produk, output) organizing.

Organisasi menurut **John D. Millet (1954)** yang dikutip buku **Inu Kencana Syafie, n.d, (2017)** yang berjudul “Ilmu Administrasi”, mengemukakan bahwa

“Organization is the structural framework within which the work of many individuals is carried on for the realization of common purpose. (Maksudnya organisasi adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama).”

Berdasarkan definisi diatas bahwa organisasi kerangka dimana kumpulan orang-orang bekerja dalam mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut **Dwight Waldo (1955)** yang dikutip buku **Inu Kencana Syafie, n.d, (2017)** yang berjudul “Ilmu Administrasi”, mengemukakan bahwa

“organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelations in a administrative system. (Maksudnya organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi).”

Berdasarkan teori diatas bahwa organisasi suatu organ yang dimana di dalamnya memiliki kewenangan serta budaya hubungan antara orang-orang dalam suatu sistem yang di dalamnya tercakup administrasi.

Organisasi menurut **Luther Gulick** yang dikutip buku **Inu Kencana Syafie, n.d, (2017)** yang berjudul “Ilmu Administrasi”

“Organization is the means of interrelating the subdivisions of work by allotting the to man who are placed in a structure of authority, so that the work may be coordinated by orders of superiors to sub ordinates, reaching from the top to the bottom of the entire enterprise. (Maksudnya, organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha).

Dari beberapa definisi diuraikan penulis berpendapat bahwa organisasi antara lain yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah tempat terselenggaranya administrasi
2. Di dalam organisasi terdapat hubungan antara dua orang atau lebih, baik individu maupun kelompok
3. Adanya kerjasama dan pembagian tugas
4. Melakukan proses aktivitas yang sesuai dengan kinerja dan kewenangan yang diberikannya
5. Adanya tujuan bersama – sama yang ingin di capai.

Dalam organisasi terdapat sekumpulan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, maka dalam mencapai tujuan dan sasarannya sebuah organisasi memiliki prinsip untuk melakukan pencapaian tujuan organisasi.

2.1.2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan pola hubungan di antara posisi di dalam organisasi dan di antara anggota organisasi. Struktur organisasi memungkinkan penerapan proses manajemen dan menciptakan kerangka ketertiban dan perintah yang melalui itu struktur organisasi bisa direncanakan, diorganisasi, diarahkan dan dikendalikan. Menurut Hill dan McShane yang dikutip oleh **Kaswan (2021:97)** dalam bukunya yang berjudul **“Organisasi Struktur, Perilaku, Proses, dan Hasil”** ada tiga dimensi dalam struktur organisasi yang meliputi:

1. Diferensiasi vertikal, yang menunjukkan lokasi penanggung jawab pembuat keputusan dalam struktur organisasi (yaitu sentralisasi atau desentralisasi) dan juga lapisan dalam hierarki (yaitu apakah struktur organisasi tinggi atau rata)
2. Diferensiasi horizontal, yang merujuk pada pembagian organisasi secara formal menjadi subunit-subunit
3. Membangun mekanisme integrasi, yaitu mekanisme untuk mengoordinasikan subunit

2.1.2.5 Konsep Pembangunan

Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik yang didalamnya mencakup ekonomi, politik, budaya, pendidikan, pertahanan, teknologi, dan infrastruktur.

Sebagaimana yang dikemukakan **Alexander** yang dikutip oleh (Digdowiseiso, 2019:8) dalam bukunya yang berjudul “**Teori Pembangunan**” bahwa proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pembangunan merupakan upaya yang dilakukan guna mencapai perubahan dalam seluruh sistem sosial yang ada di masyarakat.

Pemahaman tersebut didukung dengan pernyataan **Portes** yang dikutip oleh (Digdowiseiso, 2019:8) dalam bukunya yang berjudul “**Teori Pembangunan**”

mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan adalah proses yang terencana agar terjadinya perubahan untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Di sisi lain Siagian yang dikutip oleh (Anggara & Sumantri, 2016:20) dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Pembangunan” bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Penyataan tersebut mengandung makna bahwa pembangunan merupakan bentuk yang dilakukan oleh pemerintah atau negara guna mencapai modernitas dalam pembinaan bangsa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, pertahanan, teknologi, dan infrastruktur guna tercapainya modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

2.1.2.6 Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1)** dinyatakan bahwa

pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagaimana diatur di dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa**, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dengan kata lain, Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

2.1.2.7 Manajemen

Manajemen berasal dari kata Bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Secara sederhana, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen menurut **Sondang P. Siagian** yang dikutip oleh Usman Effendi (2014:4) dalam bukunya yang berjudul “**Asas Manajemen**” manajemen adalah kemampuan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa manajemen sangat menitikberatkan pada keahlian ataupun kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu di dalam organisasi demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan manajemen, menurut **James A.F. Stoner** yang dikutip oleh Usman Effendi (2014:4) dalam bukunya yang berjudul “**Asas Manajemen**”

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Definisi tersebut menyatakan bahwa proses kegiatan manajemen sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen, dengan

diterapkannya fungsi-fungsi manajemen dengan baik maka suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Di sisi lain, **Malayu S.P. Hasibuan (2017:2)** dalam bukunya yang berjudul **“Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah”** menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pendapat tersebut mengandung arti bahwa manajemen merupakan proses pendayagunaan sumber-sumber yang ada secara tepat sehingga tujuan dapat tercapai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh dua individu atau lebih yang ada di dalam suatu organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan oleh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan

2.1.2.8 Fungsi-fungsi Manajemen

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, diperlukannya fungsi-fungsi manajemen yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut **George R. Terry** yang dikutip oleh Usman Effendi (2014:18) dalam bukunya yang berjudul **“Asas Manajemen”** fungsi manajemen terbagi menjadi empat, diantaranya: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC)*.

Pemahaman di atas memperlihatkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian merupakan serangkaian bagian-bagian dalam manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan dapat tercapai.

Sedangkan **The Liang Gie** yang dikutip oleh Usman Effendi (2014:4) dalam bukunya yang berjudul “**Asas Manajemen**” mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen antara lain mencakup: *Planning, Decision Making, Directing, Coordinating, Controlling, Improving* (PDDCCI).

Pendapat di atas mengandung makna bahwa perencanaan, pengambilan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan peningkatan merupakan kegiatan inti dalam mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi-fungsi manajemen mengandung beberapa unsur sebagai berikut: perencanaan (*planning*) yaitu suatu kegiatan yang membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pengorganisasian (*organizing*) yaitu kegiatan mengatur segala sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, pengkoordinasian (*coordinating*) yaitu penyelarasan suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu yang ada di dalam organisasi, pengarahan (*directing*) yaitu proses memberikan petunjuk atau memberi gambaran serta motivasi kepada para anggota organisasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.1.2.9 Unsur-unsur Manajemen

Dalam proses manajemen terdapat sejumlah unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yang apabila salah satunya tidak ada, maka proses manajemen tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik. Menurut **Setyabudi Indartono** (2017:5-6) dalam bukunya yang berjudul “**Pengantar Manajemen: Character Inside**” mengemukakan unsur-unsur manajemen yang meliputi:

1. *Man*, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan.
2. *Money* atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.
3. *Material* terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.
4. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.
5. *Method* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.
6. *Market* atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat

penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen

2.1.3 Kajian Terhadap *Operasional Theory*

2.1.3.1 Koordinasi

Koordinasi secara umum dapat diartikan sebagai penyalarsan suatu kegiatan yang dilakukan sehingga dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Hasibuan, 2019: 85) dalam bukunya yang berjudul “**Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah**” koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang dilakukan secara tepat sehingga pelaksanaan pencapaian tujuan dalam tercapai.

Berkaitan dengan koordinasi, **E.F.L. Breach** yang dikutip oleh (Hasibuan, 2019:85) dalam bukunya yang berjudul “**Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah**” koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Definisi tersebut mengandung makna bahwa koordinasi adalah penyelarasan kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu yang terlibat di dalamnya

Di sisi lain, menurut **Ndraha** (2015:290) dalam bukunya yang berjudul **“Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru”**

Dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa koordinasi adalah kegiatan penggerakkan dan penyelarasan kegiatan agar berjalan terarah sehingga terciptanya efektivitas kerja guna tercapainya tujuan yang ditetapkan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, koordinasi dimaksudkan agar adanya penyelarasan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki suatu organisasi.

2.1.3.2 Jenis-jenis Koordinasi

Jenis-jenis koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh (**Hasibuan, 2019:86-87**) dalam bukunya yang berjudul **“Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah”** koordinasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Koordinasi vertikal (vertical coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-

unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Koordinasi horizontal (horizontal coordination) adalah mengoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat

Sementara itu, Dann Sugandha sebagaimana dikutip oleh (Moekijat, 1994:

31- 32) mengemukakan bahwa ada beberapa jenis koordinasi, antara lain:

1. Koordinasi internal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam suatu organisasi
2. Koordinasi eksternal, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi
3. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang setingkat
4. Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung
5. Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya
6. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinaturnya mempunyai fungsi tertentu

Berkaitan dengan jenis-jenis koordinasi, **Dr. Imas Sumiati (2022)** dalam buku hasil penelitian desertasinya yang berjudul **“Koordinasi Antar Lembaga Pengelola Transportasi Publik di Kota Bandung”** menyatakan bahwa salah satu jenis koordinasi adalah koordinasi lintas fungsi. Koordinasi lintas fungsi ditentukan melalui:

1. Strategi Koordinasi.
2. Mekanisme Koordinasi
3. Unsur Karakter Jaringan Koordinasi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa dalam jenis koordinasi lintas fungsi dapat memberikan sebuah petunjuk keberhasilan dalam sebuah koordinasi, karena dalam koordinasi lintas fungsi terdapat strategi

koordinasi yang dimana harus dilakukan untuk mengatur berbagai pihak yang terlibat supaya bekerja bersama secara efektif, kemudian bagaimana mekanisme dalam sebuah koordinasi, serta unsur karakter jaringan koordinasi yang nantinya dapat mempengaruhi efektivitas koordinasi antar individu dalam suatu jaringan. Sehingga proses koordinasi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar

2.1.3.3 Cara-cara Mengadakan Koordinasi

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (**Hasibuan, 2019:88**) dalam bukunya yang berjudul “**Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah**” mengemukakan bahwa ada beberapa cara-cara mengadakan koordinasi yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama
3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan penciptaan sasaran
5. Membina human relations yang baik antar sesama karyawan
6. Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan

2.1.3.4 Pentingnya Koordinasi dalam suatu Organisasi

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2017:86) dalam bukunya yang berjudul “**Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah**” ada beberapa alasan mengapa koordinasi dapat dikatakan penting di dalam suatu organisasi, antara lain:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, perkecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselarasikan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.

3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
4. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaans terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Pendapat di atas secara eksplisit telah menyatakan bahwa dalam organisasi yang baik terdapat sistem koordinasi yang baik sehingga untuk mencapai tujuan bersama itu tidak bisa dilakukan oleh satu bagian organisasi saja, akan tetapi dibutuhkan keselarasan seluruh bagian di dalamnya.

2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah konsep rangkaian penjelasan mengenai objek suatu permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka berpikir merupakan sebuah model dan juga gambaran yang berupa konsep yang menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa kerangka berpikir dibuat berdasarkan adanya suatu rumusan masalah yang telah dibuat dengan berdasarkan adanya suatu proses deduktif di dalam rangka yang menghasilkan beberapa konsep serta juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan penelitiannya. Kerangka berpikir mengacu terhadap teori yang berhubungan dengan permasalahan yang kemudian digunakan oleh peneliti sebagai olah ukur atau pisau analisis sejauh mana kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang objektif.

Koordinasi menurut **E.F.L Brech** yang dikutip buku **Hasibuan (2019)** yang berjudul “**Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah**” mengemukakan bahwa:

“Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.”

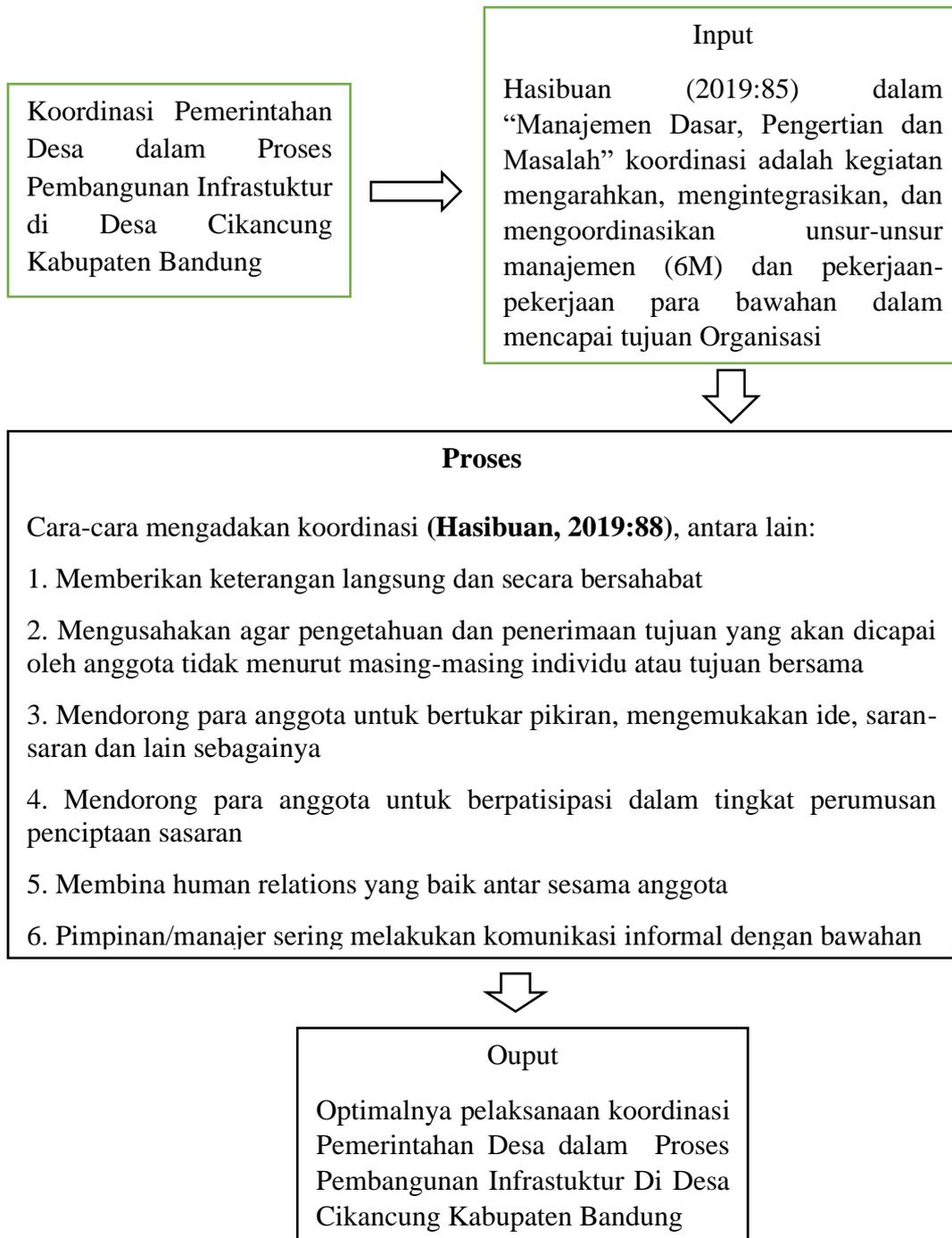
Koordinasi pada hakikatnya merupakan penyelarasan kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu yang terlibat di dalamnya

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan koordinasi harus memiliki alat ukur untuk menentukan berhasil atau tidaknya koordinasi yang dilakukan. Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan maka yang menjadi alat ukur dalam penelitian ini mengacu pada cara-cara mengadakan koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh **(Hasibuan, 2019:88)** dalam bukunya yang berjudul **“Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah”** mengemukakan bahwa ada beberapa cara-cara mengadakan koordinasi yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat (kontinuitas perencanaan): Keterangan mengenai pekerjaan saja cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri tujuan itu adalah tujuan bersama (tujuan yang jelas).
3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya (feedback)
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan penciptaan sasaran (Partisipasi)
5. Membina human relations yang baik antar sesama karyawan (hubungan langsung).
6. Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan (komunikasi).

Sehingga dalam rangka Koordinasi Pemerintahan Desa dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Cikancung akan berhasil bilamana memperhatikan enam cara-cara mengadakan koordinasi diatas oleh Pemerintahan Desa Cikancung.

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, peneliti membuat kerangka berpikir yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.2 Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah peneliti kemukakan diatas, maka peneliti akan mengajukan proposisi sebagai berikut:

Untuk melakukan Pelaksanaan koordinasi pemerintahan desa dalam proses pembangunan infrastuktur di Desa Cikancung dapat berhasil melalui cara-cara mengadakan koordinasi sebagai berikut: Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan penciptaan sasaran, Membina human relations yang baik antar sesama karyawan, dan Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Sehingga dapat menghasilkan proses koordinasi yang baik dan optimal